

## BAB I. KONSEP AGRIBISNIS PERIKANAN

### 1.1 Konsep Agribisnis

Di Indonesia, kegiatan agribisnis sudah dilakukan sejak zaman dahulu, namun demikian popularitas agribisnis baru muncul sejak tahun 1990-an. Hal ini tidak perlu diperdebatkan, yang terpenting bagaimana semua pihak mempersepsikan sama terhadap agribisnis, yaitu mulai dari kegiatan praproduksi, produksi, pengolahan/industri, pemasaran, hingga kegiatan konsumsi dan jasa pendukung semua rangkaian agribisnis.

Istilah "**agribisnis**" telah menjadi semakin populer, berbagai macam pengertian dan pemahaman tentang istilah ini telah berkembang. Dari asal katanya, "**agribisnis**" terdiri dari dua suku kata, yaitu "**agri**" (*agriculture* = pertanian) dan "**bisnis**" (*business* = usaha komersial). Oleh karena itu, agribisnis adalah kegiatan bisnis yang berbasis pertanian. Sebagai konsep, agribisnis dapat diartikan sebagai jumlah semua kegiatan-kegiatan yang berkecimpung dalam industri dan distribusi alat-alat maupun bahan-bahan untuk pertanian, kegiatan produksi komoditas pertanian, pengolahan, penyimpanan dan distribusi komoditas pertanian atau barang-barang yang dihasilkannya (Davis dan Golberg, 1957 dalam Soemarno, 1996).

Masih dalam Soemarno (1996), menurut Snodgrass dan Wallace (1974), kegiatan agribisnis tersebut merupakan kegiatan pertanian yang kompleks sebagai akibat dari pertanian yang semakin modern. Pertanian meliputi perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Agribisnis dapat memfokuskan kegiatannya pada satu segmen dari keseluruhan industri atau keseluruhan kegiatan secara terintegrasi. Agribisnis dapat berupa perusahaan besar seperti perkebunan besar, pabrik pupuk, pabrik pestisida, pabrik minyak, pabrik susu, perusahaan perikanan, dan lainnya. Selain itu juga dapat berupa perusahaan kecil, seperti perkebunan rakyat, nelayan, petani, pedagang (bakul), peternak, dan lainnya. Berikutnya, menurut Balbin dan Clemente (1986), pengertian agribisnis dapat diperluas mencakup pemerintah, pasar, asosiasi perdagangan, koperasi, lembaga keuangan, sekelompok pendidik dan lembaga lain yang mempengaruhi dan mengarahkan bermacam-macam tingkatan arus komoditas. Kemudian, Halcrow (1981) mengartikan agribisnis hanya meliputi kegiatan industri jasa dan material untuk usahatani (produksi pertanian) dan industri pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian. Sedangkan William dan Karen (1985) mengartikan agribisnis sebagai perusahaan besar (*profit company*) yang berbeda dengan petani kecil.

Dua definisi berikutnya juga tentang agribisnis: *Pertama*, agribisnis adalah bisnis yang berbasis pertanian dalam pengertian agrokomples, meliputi bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Untuk menunjang kegiatan utama di pertanian, beberapa kegiatan lain turut mendukung sukses bisnis pertanian, yaitu berbagai usaha jasa terkait pertanian, usaha penyedia sarana penunjang, maupun penyediaan prasarana pendukung kegiatan pertanian oleh pemerintah, kegiatan penelitian dan pengembangan, berbagai kelembagaan yang secara langsung maupun tidak langsung namun mendukung kegiatan pertanian, serta usaha pembiayaan atau keuangan.

Praktek bisnis pertanian tidak akan sukses dalam dalam jangka panjang jika tidak dilakukan secara terpadu, satu kesatuan dan menyeluruh. Terpadu maksudnya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara rantai agribisnis hulu sampai hilir. Pengusaha agribisnis yang memilih menjalankan rantai bisnis produksi pertanian, maka baginya tidak akan sukses jika hanya fokus melakukan produksi tanpa mengendalikan ketersediaan input (bahan baku, benih, pakan, pupuk, tenaga kerja, modal, lahan), sarana, serta pemasaran. Dalam bahasa pepatah: "lebih baik mendahulukan membangun/menciptakan *network* pemasaran

(permintaan) daripada pabrik/lahan/kolam/kios". Hal ini karena jika pasar tersedia, panen/produksi tentu segera terserap di pasar. Jika tidak, pengusaha (petani/pembudidaya ikan/nelayan/peternak/pengolah) akan menanggung risiko lain seperti harus mengeluarkan biaya untuk melanjutkan pemeliharaan, misalnya pakan, obat-obatan, menyimpan (*storage*), tenaga kerja, energi listrik, transportasi, sewa gudang/kios, dan lain-lain sebelum produk terpasarkan, bahkan risiko penyusutan berat, kualitas, sampai harga.

Keterpaduan pengelolaan rantai agribisnis ini tidak hanya dari sisi usaha agribisnis hulu sampai hilir, tetapi juga keterpaduan atau koordinasi di antara lembaga pemerintah dalam menangani agribisnis, sehingga akan mendukung praktek agribisnis itu sendiri. Koordinasi berbagai kelembagaan pemerintah yaitu antara lembaga yang menangani sarana produksi dan distribusi (Dinas Industri dan Perdagangan), urusan keuangan ditangani oleh Kementerian Keuangan, urusan keamanan pangan dikendalikan oleh Dinas Kesehatan, urusan kelautan dan perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan), dan urusan prasarana oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dalam menjaga kecukupan dan keamanan pangan (*food security and food safety*), pemerintah perlu melakukan koordinasi di antara semua bidang instansi yang menangani pertanian sektor hulu-hilir, mata rantai agribisnis, maupun dengan kelembagaan pendukung lainnya. Hal ini akan mendukung kesuksesan pelaku usaha di masing-masing rantai agribisnis dalam upaya memadukan dengan rantai agribisnis lainnya.

*Kedua*, agribisnis terdiri dari tiga sektor utama yang secara ekonomi saling bergantung satu sama lain, yaitu sektor input (faktor produksi/masukan), proses (produksi/farm/ budidaya/ penangkapan ikan), dan sektor output (hasil produksi/ panen/ produk). Sektor input dalam agribisnis terdiri dari penyediaan perbekalan bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan peternak yang secara berturut-turut untuk dapat memproduksi hasil produksi pertanian, menangkap ikan, membudidayakan ikan dan memproduksi ternak. Contoh perbekalan bagi petani adalah pupuk, bibit, bahan kimia, mesin pertanian, bahan bakar, tenaga kerja, makanan dan minuman untuk konsumsi tenaga kerja pertanian, sejumlah uang untuk membiayai pengadaan berbagai input, dan perbekalan lainnya. Perbekalan dan input bagi nelayan misalnya mesin dan kapal untuk melaut, bahan bakar, es, cold box, keranjang, alat-alat tangkap ikan (pancing, jaring, dan lain-lain), tenaga kerja (nelayan: juragan darat, juragan laut, dan nelayan anak buah kapal), makanan dan minuman untuk konsumsi nelayan selama melaut, sejumlah uang untuk membiayai pengadaan berbagai input, dan perbekalan lainnya. Perbekalan bagi pembudidaya ikan antara lain mesin dan alat budidaya ikan (kincir air, generator listrik, diesel, mesin penghitung benih, mesin pembajak sawah, jaring, perangkat reproduksi buatan dan lain-lain), bahan bakar, pakan ikan, pupuk, obat-obatan untuk budidaya, tenaga kerja (pembudidaya, teknisi budidaya: di tambak, kolam, laut), makanan dan minuman untuk konsumsi pembudidaya, sejumlah uang untuk membiayai pengadaan berbagai input, dan perbekalan lainnya. Adapun perbekalan untuk peternak meliputi mesin dan alat beternak (mesin penetas telur, mesin pemeras susu, perangkat reproduksi buatan, dan lain-lain), pakan ternak, obat-obatan peternakan, tenaga kerja (peternak dan teknisi peternakan), makanan dan minuman untuk konsumsi peternak, sejumlah uang untuk membiayai pengadaan berbagai input, dan perbekalan lainnya.

Berdasarkan keterangan di atas, "agribisnis" secara luas dapat dipandang sebagai "bisnis" yang berbasis pertanian dan mengintegrasikan strategi bisnis ke dalam kegiatan pertanian. Strategi bisnis harus '*capable to match*' tantangan persaingan global. Secara struktural usaha bisnis ini terdiri atas tiga sektor yang saling bergantung, yaitu (i) sektor masukan, yang ditangani oleh berbagai industri hulu yang memasok bahan masukan kepada sektor pertanian, (ii) sektor produksi (farm), yang ditangani oleh berbagai jenis usahatani yang menghasilkan produk-produk bio-ekonomik, dan (iii) sektor keluaran, yang ditangani oleh berbagai industri hilir yang mengubah hasil usahatani menjadi produk konsumsi

awetan/olahan dan yang menyalurkan produk ini melalui sistem pemasaran kepada konsumen (Downey dan Erickson, 1989 dalam Soemarno, 1996).

Konsep agribisnis yang ditulis oleh Pasaribu (2012) adalah sebagai berikut:

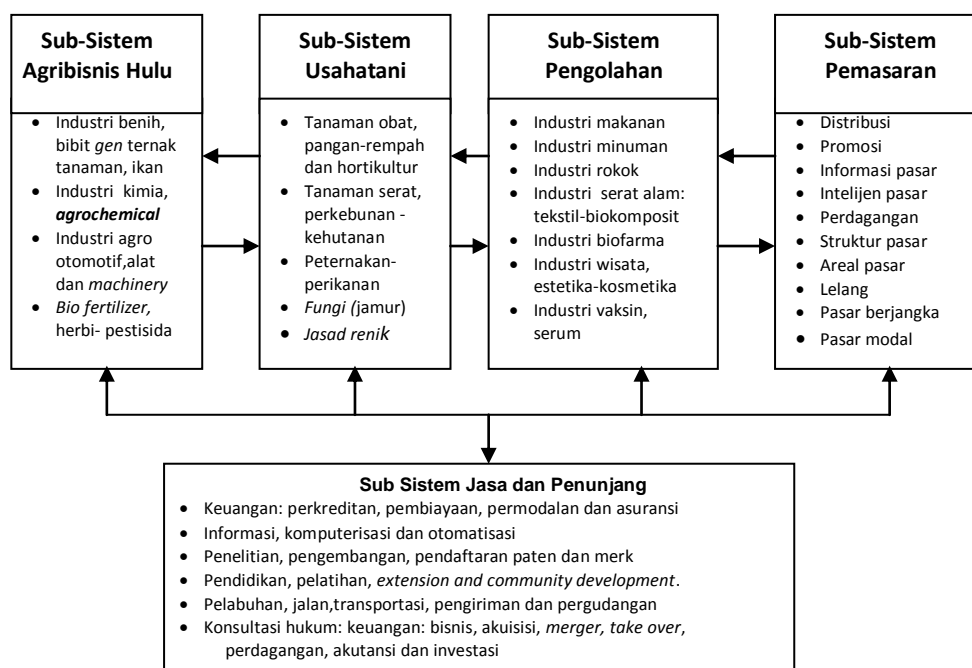
- Suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran yang luas, yaitu kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan-kegiatan pertanian.
- Sebuah sistem kegiatan yang meliputi tiga komponen *the farm input sector, the farming sector, dan the product marketing sector*.
- Keseluruhan dan kesatuan dari seluruh organisasi dan kegiatan mulai dari produksi dan distribusi sarana produksi, kegiatan produksi pertanian di lahan pertanian sampai dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan turun sampai distribusi hasil akhir dari pengolahan tersebut ke konsumen.
- Agribisnis meliputi semua aktivitas sebagai rangkaian system, terdiri dari (1) sistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan pengembangan sumberdaya pertanian, (2) subsistem produksi pertanian atau usaha tani, (3) subsistem pengolahan hasil-hasil pertanian atau agroindustri, dan(4) subsistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian.

Pambudy (2010) menulis bahwa agribisnis mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, peternakan, pariwisata (*agro dan eco-tourism*) yang seluas-luasnya (hulu-*on farm*-hilir dan jasa-jasa penunjangnya). Dengan demikian pengembangan *entrepreneur* dalam sistem dan usaha agribisnis dapat diarahkan paling tidak pada lima kelompok besar (*subsystem*) pengembangan yaitu:

1. Mengembangkan *entrepreneur* dan perusahaan keluarga/kecil/menengah dan besar dalam lingkup subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) yakni industri yang menghasilkan barang modal bagi pertanian (arti luas) yakni industri perbenihan/pembibitan (*genome-DNA*) tumbuhan dan hewan, industri agrokimia (pupuk, pestisida, obat/vaksin ternak, ikan, manusia) dan industri agro-otomatif (mesin dan peralatan pertanian) serta industri pendukung lainnya.
2. Mengembangkan *entrepreneur* dan perusahaan keluarga/kecil/menengah dan besar dalam sub-sistem usahatani (*on-farm agribusiness*) yakni kegiatan yang menggunakan barang modal dan sumberdaya alam untuk mengasilkan komoditas pertanian primer tanaman pangan, pakan, serat, hortikultura, rempah, herbal, obat-obatan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
3. Mengembangkan *entrepreneur* dan perusahaan keluarga/kecil/menengah dan besar yang bergerak dalam sub-sistem pengolahan (*down-stream agribusiness*) yakni industri yang mengolah komoditas pertanian primer (agroindustri) menjadi produk olahan antara (*intermediateproduct*) dan akhir (*finish product*). Termasuk di dalamnya industri makanan, minuman, pakan, industri dasar bahan serat (karet, *plywood, pulp*, kertas, kayu, rayon, komposit, benang kapas/sutera, barang kulit), indutri biofarma, agrowisata, estetika dan kosmetika.
4. Mengembangkan *entrepreneur* dan perusahaan keluarga/kecil/menengah dan besar dalam subsistem jasa bagi subsistem agribisnis hulu, subsistem usahatani dan subsistem agribisnis hilir. Dalam subsistem ini adalah jasa keuangan, hukum, perkreditan, asuransi, transportasi (darat, laut, udara), pergudangan, pendidikan, penelitian, pelatihan, periklanan dan sistem informasi-komputerasi.
5. Mengembangkan *entrepreneur* dan perusahaan keluarga/kecil/menengah dan besar dalam sistem yang terintegrasi mulai dari hulu-hilir sampai pemasaran hasil komoditas pertanian, perikanan dan kehutanan (segar maupun olahan). Termasuk didalamnya adalah

kegiatan distribusi, perdagangan, promosi, informasi pasar, serta intelijen pasar (*market intelligence*) agar bisa bertahan di pasar domestik dan bersaing di pasar global.

Penggambaran lingkup pengembangan *entrepreneur* dalam sistem agribisnis disajikan pada Gambar I-1.



**Gambar I-1: Lingkup Pengembangan *Entrepreneur* dalam Sistem Agribisnis (Pambudy, 2010).**

Beberapa definisi agribisnis yang penulis kembangkan dari Soemarno (1996), Firdaus (2010) dan Pambudy (2010) serta dari berbagai pengertian yang telah berkembang secara umum, yaitu:

- Terdapat definisi agribisnis yang hanya menyinggung sektor input (masukan). Jadi, definisi agribisnis yang sempit dan tradisional ini hanya menunjuk pada produsen dan pembuat bahan masukan untuk produksi pertanian. Contoh badan usaha agribisnis yang tercakup dalam definisi ini adalah penyalur bahan kimia dan obat-obatan tanaman/ternak/ikan, pupuk buatan (baik organik maupun kimiawi), mesin pertanian (termasuk perikanan, peternakan), usaha pembenihan (pembuat) bibit tanaman, usaha pembenihan dan pendederan ikan, usaha pembuatan pakan alami maupun buatan untuk ikan/ternak, kredit pertanian, dan lembaga keuangan lain yang melayani sektor produksi.
- Agribisnis sering pula diartikan sebagai perdagangan atau pemasaran hasil pertanian.
- Dewasa ini, pandangan tentang agribisnis yang secara umum dianggap tepat sudah semakin luas. Menurut pandangan ini, agribisnis mencakup semua kegiatan mulai pengadaan sarana produksi pertanian (*farm supplies*) sampai tataniaga produk pertanian yang dihasilkan usahatani atau hasil olahannya.
- Senada dengan poin c, menurut Arsyad, dkk (1985), yang dimaksud dengan agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian agrokomples (pertanian, perikanan, dan peternakan) dalam arti luas. Pertanian dalam arti luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.

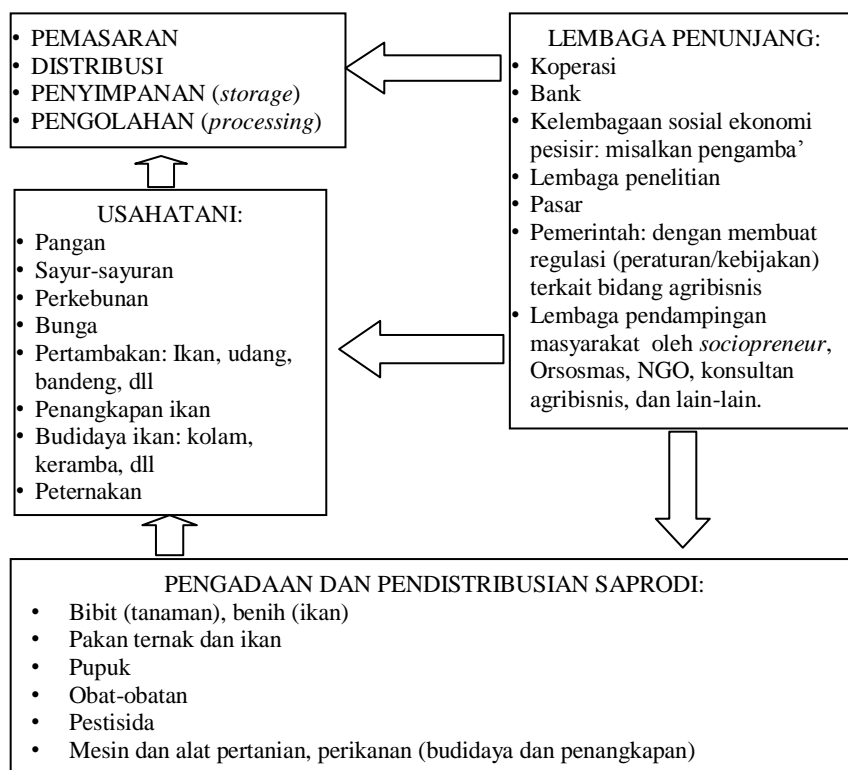
- e. David and Goldberg, Sonka and Hunson, farrel and Funk berpendapat bahwa *agribusiness included all operations involved in the manufacture and distribution of farm supplies, productions on the farm; the storage, processing and distribution of farm commodities made from them, trading (wholesaler, retailers), consumers to it, all non farm firms and institution serving them...* (Harling, 1995).
- f. Agribisnis terdiri atas (i) sektor masukan, yang ditangani oleh berbagai industri hulu yang memasok bahan masukan kepada sektor pertanian, (ii) sektor produksi (farm), yang ditangani oleh berbagai jenis usahatani yang menghasilkan produk-produk bio-ekonomik, dan (iii) sektor keluaran, yang ditangani oleh berbagai industri hilir yang mengubah hasil usahatani menjadi produk konsumsi awetan/olahan dan yang menyalurkan produk ini melalui sistem pemasaran kepada konsumen

Berdasarkan penjelasan poin a sampai f, agribisnis (termasuk agribisnis perikanan) digambarkan sebagai sebuah sistem yang terdiri atas lima subsistem, yaitu sebagai berikut:

- a. Subsistem pembuatan, pengadaan, dan distribusi berbagai sarana produksi pertanian (*farm supplier*), seperti benih (ikan), bibit (tanaman), pupuk, obat-obatan, alat dan mesin pertanian (mesin pembajak sawah, mesin pemanen padi, cangkul, sabit, dan lain-lain), mesin dan alat budidaya ikan dan udang (seser, mesin filter, kincir air, jarring, bak air, alat/teknologi reproduksi buatan, alat/teknologi rekayasa genetika ikan, dan lain-lain), alat dan mesin penangkapan ikan (perahu, jarring, mesin diesel, pancing, coldbox, keranjang, pelampung, GPS, dan lain-lain), bahan bakar, dan kredit. Pelaku kegiatan ini antara lain perusahaan swasta, koperasi, lembaga pemerintah, bank atau perorangan.
- b. Sub sistem kegiatan produksi dalam usahatani (*included fishing effort, culture effort*) yang menghasilkan berbagai produk pertanian seperti bahan pangan, hasil perkebunan, ikan, udang, daging, telur, dan lain-lain. Usahatani mencakup semua bentuk organisasi produksi mulai dari yang berskala kecil (usahatani keluarga) sampai yang berskala besar (perkebunan, peternakan, pertambakan, hatchery, penangkapan ikan laut), termasuk budidaya pertanian yang menggunakan lahan secara intensif seperti akuakultur, florikultur, hidroponik, tambak udang atau bandeng intensif, budidaya kerapu di tambak maupun keramba, dan lain-lain. Pengusaha kegiatan iniantara lain petani, perusahaan swasta, koperasi, lembaga pemerintah, maupun perorangan. Teknologi yang digunakan mulai dari yang sederhana, tradisional, sampai yang *high technology*, sehingga performan usahatannya pun berbeda-beda. Di antara pengusahatani tersebut ada yang hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarga (disebut usahatani subsistem), adapula yang memang diusahakan untuk memenuhi kebutuhan/permintaan pasar (disebut usahatani komersial/perusahaan pertanian/perusahaan perikanan).
- c. Subsistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyaluran berbagai produk pertanian yang dihasilkan usahatani atau hasil olahannya ke konsumen. Pengusaha yang berkecimpung di subsistem ini antara lain perusahaan swasta, koperasi, lembaga pemerintah, bank, maupun perorangan.

Hubungan antara satu subsistem dengan subsistem lainnya sangat erat dan saling tergantung atau tidak dapat berdiri sendiri, artinya siapapun yang memilih salah satu subsistem untuk menjadi fokus bisnisnya, maka dia tidak akan sukses tanpa mengendalikan/mengkaitkan/memanage/mengkoordinasi/merakit subsistem yang lain. Sehingga apabila terjadi gangguan pada salah satu subsistem akan menyebabkan terganggunya keseluruhan subsistem. Oleh sebab itu, pemahaman hubungan-hubungan yang terdapat antara masing-masing subsistem ini, baik ke depan maupun ke belakang beserta lembaga penunjangnya (koperasi, bank, regulasi/kebijakan/peraturan pemerintah, pasar, jasa

angkutan, dan lain-lain) merupakan salah satu tujuan penting dalam kurikulum agribisnis. Penambahan kata manajemen sebelum agribisnis, sehingga menjadi manajemen agribisnis menunjukkan pentingnya mengelola/memanage (*by management*) hubungan-hubungan yang ada dalam seluruh subsistem usaha agribisnis agar tercapai keterpaduan antara semua subsistem agribisnis, bahkan siapa pelaku dalam tiap subsistem, serta teknologi yang digunakan (mekanis, organik, kimia, biologis, padat karya, padat modal). Gambar I-2 memperjelas hubungan keterkaitan antara subsistem dalam agribisnis.



Gambar I-2. Hubungan Keterkaitan antar Subsistem dalam Agribisnis (dikembangkan dari Firdaus, 2010).

Pada umumnya, pelaku pada model agribisnis yang paling sederhana (disebut subsisten) yang menjalankan ketiga subsistem pada Gambar I-2 (saprodi, usahatani, dan pasca produksi: pengolahan, penyimpanan, distribusi, pemasaran) adalah hanya seorang pelaku (*one person agribusiness*). Sarana produksi: pupuk biasanya berasal dari kompos kotoran ternak, sedangkan pengolahan hasil pertanian sangat sederhana dan pemasarannya terbatas di sekitar rumahnya. Contoh usaha subsisten pada perikanan adalah budidaya tambak/kolam sekala tradisional, dimana saprodi: pakan dari pakan alami yang tersedia di di kolam dan daun-daunan di sekitar kolam (untuk ikan gurame), sisa-sisa makanan dan kotoran manusia (untuk pakan lele), bagi pemancing ikan menggunakan umpan alami (cacing), lalu pengolahan hasil perikanan juga sangat sederhana dan pemasarannya juga masih terbatas di sekitar tempat tinggalnya.

Pada agribisnis yang setingkat komersial pada umumnya memiliki berbagai tugas perusahaan yang terbagi ke dalam beberapa bagian organisasi tergantung seberapa kompleks urusan agribisnisnya sejalan dengan perubahan dan penerapan iptek atau inovasi. Keberhasilan agribisnis dalam mencapai tujuan utamanya (*main goal*) sangat tergantung pada faktor manajemen, sehingga perkembangan terakhir dalam mempelajari dan menerapkan agribisnis di tengah persaingan yang sangat ketat selalu menggunakan manajemen. Keahlian manajemen tersebut biasanya disebut sebagai *manajerial skill*. Pengusaha yang memiliki

manajerial skill akan mampu meningkatkan *added value* produk dalam rangka memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, paradigma mengelola dan menjalankan agribisnis sering digunakan istilah MANAJEMEN AGRIBISNIS. Fungsi-fungsi manajemen yang harus diterapkan pada setiap subsistem agribisnis untuk mencapai sukses agribisnis adalah *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (*how to act*, pergerakan) dan *controlling* (pengendalian dan pengawasan). Manajemen juga berperan menjadi penghubung antara pengelola (tim manajemen: manajer dan stafnya) dan pemilik (*agribusiness owner*).

## 1.2 Perikanan dan Usaha Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dari pengertian tersebut, ternyata ruang lingkup bidang perikanan sangat luas, yang tidak hanya memanfaatkan sumberdaya ikan dan lingkungannya, tetapi juga mengelolanya. Kata “pemanfaatan” bermakna sekedar mengeksploitasi, mengeksplorasi dan memanfaatkan sumberdaya ikan dan lingkungannya tanpa ada upaya perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta konservasi. Oleh karena itu, kajian yang terkandung dalam kata “perikanan” diperluas dengan adanya kata “pengelolaan”. Lebih lanjut Undang-Undang 45 Tahun 2009 mendefinisikan pengelolaan sebagai semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuannya yang telah disepakati.

Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya. Sumber daya perikanan termasuk kepada kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui (*renewable source*). Meskipun demikian dalam pemanfaatan sumber daya ini harus rasional sebagai usaha untuk menjaga keseimbangan produksi dan kelestarian sumber daya. Hal ini perlu adanya penegasan karena sumber daya perikanan merupakan sumber daya milik bersama (*common property resources*) dalam artian hak properti atas sumber daya tersebut dipegang secara bersama-sama sehingga tidak ada larangan bagi siapapun untuk memanfaatkannya.

Pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan (*Resources*) menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat sebagai pengguna sumberdaya (*Users*) dan pemerintah sebagai fasilitator dan manager pengelolaan (*Management*). Dua komponen yang pertama (*Resources* dan *Users*) memerlukan komponen ketiga yaitu manager pengelolaan (*Management*) agar penggunaan *resources* oleh *users* lebih berdayaguna, bernilai tambah (*added value*), dan tetap memperhatikan kelestariannya. Dengan kata lain, agar pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan (*resources*) oleh *users* (nelayan, pembudidaya ikan, pedagang, dan komponen masyarakat lainnya) tidak sekedar berorientasi kepentingan ekonomi semata, maka peran pemerintah sangat penting untuk membuat berbagai kebijakan untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan.

Usaha yang dilakukan oleh *users* dalam memanfaatkan sumberdaya ikan dan lingkungannya disebut sebagai usaha perikanan. Praktek pemanfaatan sumberdaya perikanan dapat melalui penangkapan ikan (perikanan tangkap) dan budidaya ikan. Sehingga usaha perikanan merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan pasca panen mulai dari

menyimpan (*storage*), mengolah (*processing*), mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil dan mendapatkan laba dari kegiatan yang dilakukan. Menurut Undang-Undang 45 Tahun 2009, yang dimaksud usaha perikanan adalah usaha yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Dengan demikian, usaha perikanan bukan hanya usaha di bidang produksi (budidaya ikan dan penangkapan ikan), namun demikian juga usaha pendukung produksi (usaha pra produksi) dan usaha pasca produksi (pengolahan dan pemasaran) untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) hasil-hasil perikanan. Sedangkan berdasarkan BPS dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2009, yang termasuk dalam sektor perikanan adalah kegiatan usaha yang mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting), moluska, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar. Dari berbagai pemahaman di atas, maka usaha perikanan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Usaha pra produksi perikanan merupakan usaha pendukung dan penyedia sarana, input, saprodi, dan berbagai perbekalan nelayan maupun pembudidaya ikan, misalnya usaha pembuatan kapal ikan, usaha penyedia alat tangkap ikan (jaring, pancing, pelampung, dan lain-lain), usaha produksi mesin penangkapan ikan (diesel, sparepart, dan lain-lain), usaha penyediaan pupuk, pakan ikan, es, keranjang, box, cold box, obat-obatan perikanan, usaha penyediaan teknologi reproduksi buatan, usaha pertokoan sembako, makanan dan minuman untuk perbekalan melaut dan budidaya, sampai usaha jasa penyediaan tenaga kerja produksi perikanan, dan lain-lain.
- b. Usaha pembudidayaan ikan (*aquaculture effort*) adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan disebut pembudidaya ikan.
- c. Penangkapan ikan (*fishing effort*) adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan disebut nelayan (*fisherman*). Menurut Ningsih (2005) sumber daya perikanan laut dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok besar yaitu: (1) sumber daya ikan demersal, yaitu jenis ikan yang hidup di atau dekat dasar perairan; (2) sumber daya ikan pelagis, yaitu jenis sumber daya ikan yang hidup di sekitar permukaan perairan; (3) sumber daya ikan pelagis besar, yaitu jenis ikan *oceanik* seperti tuna, cakalang, tenggiri dan lain-lain; (4) sumber daya udang dan biota laut non ikan lainnya seperti kuda laut.
- d. Usaha pengolahan ikan (*fish processing effort*) merupakan usaha yang bertujuan menciptakan dan atau menambah kegunaan (*utility*) ikan, baik kegunaan waktu (*time utility*) maupun kegunaan bentuk (*form utility*). Orang yang melakukan usaha pengolahan ikan disebut pengolah ikan (*fish processor*).
- e. Usaha pemasaran ikan (*fish marketing effort*) merupakan semua upaya untuk menyampaikan ikan dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan pemasaran ikan disebut pedagang atau pemasar ikan (*fish middlemen*). Menurut Crawford (1997), kegiatan pemasaran menurut fungsinya ada 3 kelompok, yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitasi. Dari ketiga fungsi tersebut terbagi menjadi 9 kegiatan, yaitu *buying, selling, storage, transportation, processing, standardization, financing, risk bearing, market intelligence*. Berdasarkan apa yang ditulis oleh Crawford, ternyata pengolahan (*processing*) merupakan bagian kegiatan pemasaran, sedangkan pemerintah RI melalui UU 31/2004 tentang Perikanan dan UU



45/2009 tentang Perubahan atas UU Perikanan 31/2004 mengklasifikasikan usaha pengolahan sebagai salah satu usaha mandiri dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi usaha praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

- f. Sebagai tambahan, ada usaha jasa dan kelembagaan pendukung keseluruhan usaha perikanan (rantai agribisnis perikanan), misalnya lembaga keuangan penyedia kredit/permodalan untuk usaha agribisnis perikanan seperti bank, koperasi, bakul (pedagang) ikan yang sekaligus meminjami modal ke nelayan, dan sejenisnya.

Selanjutnya, Undang-Undang 45 Tahun 2009 juga mengatur setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah NKRI wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan saranaproduksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP menjadi salah satu *tool* pemerintah dalam mengelola sumberdaya ikan dan lingkungannya.

### 1.3 Manajemen Agribisnis Perikanan

Menggabungkan ketiga kata “manajemen, agribisnis, dan perikanan” ke dalam satu nama matakuliah atau kajian ilmu mengandung maksud adanya spesifikasi bidang perikanan sebagai salah satu kajian keilmuan manajemen agribisnis. Bangsa ini sudah saatnya memosisikan sektor perikanan dan kelautan sebagai *prime mover* perekonomian nasional. Hal ini selain karena potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar, siap mendampingi pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan khususnya nasional. Selain itu, kecukupan/ketahanan pangan (*food security*) dewasa ini telah menjadi isu sentral dan penting. Pertumbuhan penduduk jauh lebih tinggi dibandingkan ketersediaan dan penyediaan pangan.

Sebagaimana telah didefinisikan tentang manajemen agribisnis di atas, maka manajemen agribisnis perikanan adalah upaya pengelolaan agribisnis yang berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan. Apalagi komoditas perikanan memiliki karakteristik yang khas, misalnya mudah rusak (*perishable food*), musiman, padat karya, skala usaha kecil, modal terbatas, dan teknologinya sederhana, maka penerapan manajemen dalam agribisnis perikanan dengan pengambilan keputusan yang tepat menjadi kunci keberhasilan manajer agribisnis perikanan.

#### SOAL:

1. Apa yang saudara pahami tentang agribisnis, agribisnis perikanan dan manajemen agribisnis perikanan?
2. Jelaskan ruang lingkup perikanan!
3. Apa hubungan antara usaha perikanan dan manajemen agribisnis perikanan?
4. Jelaskan prinsip keterpaduan dalam mata rantai agribisnis perikanan!

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Wen-Chi Huang, and D. S. Pratomo. 2011. *Determinants of retailer's profit at Gunungsari Ornamental Fish Market, East Java, Indonesia*. Rural Economics Society of Taiwan (REST) Conference: 2011. National Chung Hsing University. Taichung, Taiwan.
- Anindita, R. 2004. *Pemasaran Hasil Perikanan*. Penerbit Papyrus. Surabaya.
- Assauri, S. 2007. *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep dan Strategi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Crawford, I. M. 1997. *Agricultural and Food Marketing Management*. Rome: The FAO Regional Office for Africa.
- Darmawan, Dedi. 2011. *Pengembangan Usaha Ikan Gurame (*Osphronemus gouramy*) di Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung*. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Effendy, Rustam. 2000. *Pengantar Bisnis Modern*. Penerbit Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.
- Ekawarna, 2010. *Manajemen Badan Usaha dan Koperasi*. Gaung Persada Press. Jakarta.
- Firdaus, Muhammad. 2010. *Manajemen Agribisnis*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hisrich, R. D. and M. P. Peters. 1995. *Entrepreneurship: Starting, Developing and Managing a New Enterprise*. 3rd Edition. The United States of America: Richard D. Irwin, Inc.
- Lin Yong Suen, 2012. *Handbook of Business Administration*. National Pingtung University of Science and Technology. Taiwan.
- Mankiw, 2003. *Mankiw Principles of Economics 3th*. Pdf files and powerpoints.
- MMAF, 2011. *Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014*. Jakarta.
- Ningsih, 2005. *Strategi Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Laut dan Perikanan*. Majalah Info Kajian Bappenas, Volume 2, 2005.
- Pambudy, Rachmat. 2010. *Membangun Indonesia Melalui Kepemimpinan Entrepreneur Agribisnis*. Makalah disampaikan pada Simposium Internasional PPI Dunia 2010 "Pendidikan Kewirausahaan sebagai Upaya Peningkatan SDM Pelajar Indonesia yang Mandiri dan Inovatif" Diselenggarakan oleh *Overseases Indonesian Student Association Alliance*. London, 23-24 Oktober 2010.
- Pasaribu, Ali M. 2012. *Kewirausahaan Berbasis Agribisnis*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Putra, Dody Yuli. 2011. *Peran sektor Perikanan dalam Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia: Analisis Input-Output*. Program Pasca Sarjana, Universitas Andalas.
- Riniwati, Harsuko. 2012. *Modul Ajar Pengantar Ilmu Ekonomi*. UB Kediri.
- Rosyidi, Suherman. 2000. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Rukmana, H. Rahmat. 2005. *Ikan Gurami Pembenihan dan Pembesaran*. Kanisius. Yogyakarta.

- Saptana, dkk. 2004. *Integrasi Kelembagaan Forum Kass dan Program Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Agribisnis Sayuran Sumatera*. AKP. Vol. 2, No.3, September 2004: 257-276
- Soemarno, 1996. *Manajemen Agribisnis: Organisasi dan Manajemen Sumberdaya Manusia*. Makalah disajikan dalam Penataran Agribisnis bagi Kepala Bidang Pertanian Umum Kanwil Pertanian dan Kepala Sub Dinas Bina Usaha Lingkup Pertanian pada tanggal 30 s/d 3 Oktober 1996 di Hotel Mirama Surabaya.
- Rosyidi, S. 1994. *Pengantar teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sunoto. 2011. *Arah Kebijakan Pengembangan Konsep Minapolitan di Indonesia*. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang *Pokok-pokok Perkoperasian*.
- Undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional*.
- Undang 45 Tahun 2009 tentang *Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*.